

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik kebangsaan NU merupakan bagian instrumen untuk membangun peradaban bangsa yang mampu mendinamisir bangsa ke arah yang benar dan bermartabat sesuai dengan keinginan dan tujuan semua bangsa Indonesia, dengan pola gerakan politik kebangsaan NU pasca khittah 1926. Dan beberapa landasan pola pikir politik kebangsaan NU yang dirumuskan dalam bentuk sembilan pedoman berpolitik, salah satu pedoman tersebut adalah berpolitik mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Peran NU dalam ikut menggagas, merintis, dan memperjuangkan berdirinya negeri ini, jelas sangat besar dan tidak bisa diingkari siapa pun. Bahkan, bersama Muhammadiyah, menjadi bagian inti dalam proses perumusan konstitusi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945. Atas dasar alasan historis ini sangat jelas, NU memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Konsekuensinya, NU tidak bisa menafikan diri dari politik, yaitu politik kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
2. Dengan berpijak pada tradisi *fiqh*, maka wilayah Hindia-Belanda ini kemudian ditetapkan sebagai *dar al-salam* atau *dar al-shulh* (negeri damai).

Argumentasinya jelas: meskipun pemerintahannya tidak Islami, tetapi umat Islam di dalamnya memiliki hak untuk melaksanakan syari'at Islam dengan nyaman dan aman. Hal ini menegaskan satu prinsip, bahwa ketika prinsip dasar Islam, yakni pelaksanaan syari'at bisa dilaksanakan di sebuah negara yang struktur konstitusionalnya tidak Islami; hukum bagi negara tersebut bukanlah dar al-harb, melainkan dar al-salam, negeri damai

B. Saran

1. NU sebagai bagian dari bangsa Indonesia sebaiknya berada pada posisi sebagai kekuatan *civil socceity* untuk mengawal perjalanan bangsa, agar arah dan kebijakan yang dilakukan oleh negera tidak kehilangan arah. NU sudah selayaknya untuk tidak terjebak pada politik praktis tetapi lebih kepada posisi dan peran-peran strategis dalam menjalankan politiknya yaitu dengan politik kebangsaan yang akan memihak bagi kepentingan seluruh bangsa Indonesia, dan pada akhirnya, efektifitas Politik Kebangsaan NU akan berbanding lurus dengan usaha menciptakan ketertiban dan kemaslahatan sosal.
2. NU sangat penting untuk melakukan pendidikan politik yang beretika bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara menyeluruh dan berkesinambungan, sekaligus memberikan pemahaman akan arti penting menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai aural ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat.